PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/
Volume 6, Nomor 2, Oktober 2026
E-ISSN: 2807-9337

Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Era Digital

Suyono[1*], Maria Dewi Ratnasari[2], Fatima Susana Dian[3], Natasya Febby Adelia[4], Harits Abdur Rahman[5]
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia[1,2,3,4,5]
*suyono@unipasby.ac.id[1]

Abstract

Political participation provides citizens with opportunities to influence public decision-making. The development of digital technology has created new spaces for young people to access information, express aspirations, build communication networks, and engage in various political activities. However, these opportunities also present challenges, including misinformation, disinformation, polarization, symbolic participation, and disparities in digital access and skills. This study aims to describe the role of young people in enhancing political participation in the digital era, including their forms of engagement, opportunities, and challenges. This research employs a descriptive qualitative approach using a literature review method. Data were collected through an examination of relevant books, scientific articles, reports, and legislation. The literature was analyzed by identifying, classifying, comparing, and synthesizing information based on the research themes. The findings indicate that young people can enhance political participation by becoming informed and independent voters, promoting political education through digital media, monitoring public policies, and translating online activities into real-world actions. Strengthening political participation requires improving political and digital literacy, promoting ethical communication, empowering organizations and communities, and providing responsive and inclusive public participation channels. Therefore, the quality of political participation is determined not merely by social media activity but also by critical, responsible, and sustained engagement in democratic life.

Keywords: Youth Generation, Political Participation, Digital Era, Political Literacy

Abstrak

Partisipasi politik memberikan kesempatan kepada warga negara memengaruhi pengambilan keputusan publik. Perkembangan teknologi digital menghadirkan ruang baru bagi generasi muda memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, membangun komunikasi, serta terlibat dalam berbagai aktivitas politik. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan berupa misinformasi, disinformasi, polarisasi, partisipasi simbolis, dan kesenjangan akses maupun kemampuan digital. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran generasi muda dalam meningkatkan partisipasi politik di era digital, termasuk bentuk keterlibatan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Data diperoleh melalui penelaahan buku, artikel ilmiah, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan pustaka dianalisis dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan menyintesiskan informasi berdasarkan tema kajian. Hasil menunjukkan generasi muda meningkatkan partisipasi politik dengan menjadi pemilih yang cerdas dan mandiri, menyebarkan pendidikan politik melalui media digital, mengawasi kebijakan publik, serta menghubungkan aktivitas daring dengan tindakan nyata. Penguatan partisipasi memerlukan peningkatan literasi politik dan digital, penerapan etika komunikasi, penguatan organisasi dan komunitas, serta penyediaan saluran partisipasi publik yang responsif dan inklusif. Kualitas partisipasi politik tidak hanya ditentukan oleh aktivitas di media sosial, tetapi juga oleh keterlibatan kritis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam kehidupan demokrasi nasional.

Kata Kunci: Generasi Muda, Partisipasi Politik, Era Digital, Literasi Politik

I. PENDAHULUAN

Partisipasi politik sebagai bagian dari demokrasi karena memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan publik (Dahl, 1998). Partisipasi ini tidak hanya diwujudkan melalui pemungutan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga melalui diskusi publik, penyampaian aspirasi, pengawasan kebijakan, kegiatan organisasi, dan keterlibatan penyelesaian persoalan masyarakat. Budiardjo (2008) menjelaskan partisipasi politik berkaitan dengan keterlibatan warga negara dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Kualitas demokrasi ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga politik, tetapi juga kesediaan masyarakat terlibat secara sadar dan bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi juga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk aktivitas di ruang digital. Saud dan Margono (2021) menunjukkan perkembangan media digital di Indonesia membuka ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan pandangan politik dan terlibat dalam berbagai aktivitas demokrasi.

Generasi muda adalah kelompok strategis dalam meningkatkan partisipasi politik karena berada pada tahap pembentukan pandangan politik, memiliki potensi kreativitas, dan relatif akrab dengan perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan internet dan media sosial memungkinkan informasi politik tersebar dengan cepat serta membuka ruang baru masyarakat berkomunikasi dengan pejabat publik, organisasi masyarakat, maupun sesama warga negara. Kondisi ini memberikan peluang generasi muda untuk menjadi pemilih yang kritis, pembuat gagasan, penggerak kegiatan sosial, dan pengawas jalannya pemerintahan. Rafiki dan Dewi (2022) melalui kajian kepustakaan mengenai gerakan muda berkarakter Pancasila di era digital menekankan pentingnya penguatan karakter generasi muda menghadapi teknologi dan perubahan sosial. Penguatan pengetahuan kewarganegaraan melalui pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian Widyatama dkk. (2022) melalui pengembangan aplikasi pembelajaran PPKn pada materi lembaga-lembaga negara. Berbagai kajian memperlihatkan perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan generasi muda di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penggunaan media digital ini tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas partisipasi politik. Informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar secara luas, perdebatan politik dapat berubah menjadi saling menghina, dan aktivitas di media sosial

terkadang hanya berhenti pada tindakan menyukai atau membagikan unggahan tanpa disertai pemahaman mendalam. Wardle dan Derakhshan (2017) menjelaskan penyebaran misinformasi, disinformasi, dan malinformasi sebagai persoalan serius dalam ekosistem informasi digital yang dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi perlu disertai kemampuan mengevaluasi informasi, memeriksa kebenaran berita, dan memahami proses politik secara kritis. Partisipasi politik yang bermakna menuntut lebih dari sekadar kehadiran di ruang digital, tetapi juga perlu didasarkan pada pengetahuan, sikap kritis, etika, dan tanggung jawab kewarganegaraan.

Keterlibatan generasi muda merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kepentingan, dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Mahasiswa dan pemuda dapat mengambil bagian, seperti mengikuti diskusi mengenai isu publik, terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, menyampaikan aspirasi secara santun, menggunakan hak pilih berdasarkan pertimbangan rasional. Keterlibatan ini membantu menghadirkan perspektif generasi muda dalam proses pengambilan keputusan, terutama mengenai persoalan pendidikan, lapangan pekerjaan, lingkungan, dan pelayanan publik. Gumuruh dkk. (2022) menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi melalui musyawarah, mufakat, dan partisipasi kehidupan bermasyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan antara luasnya akses generasi muda terhadap ruang digital dan kualitas partisipasi politik yang dihasilkan, terutama ketika kemudahan memperoleh informasi belum diikuti kemampuan memverifikasi informasi, bersikap kritis, dan berkomunikasi secara etis. Perlu pemahaman mengenai bagaimana generasi muda dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara kritis, etis, dan konstruktif agar partisipasi politik di era digital benar-benar memberikan kontribusi terhadap penguatan demokrasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran generasi muda dalam meningkatkan partisipasi politik di era digital, termasuk bentuk keterlibatan, peluang, dan tantangan yang dihadapi berdasarkan kajian kepustakaan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan warga negara di berbagai aktivitas bertujuan memengaruhi proses pemilihan pemimpin, pengambilan keputusan pemerintah, maupun penentuan arah kebijakan publik (Huntington & Nelson, 1976). Keterlibatan ini memiliki bentuk yang beragam, mulai dari kegiatan konvensional seperti menggunakan

hak pilih dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan warga, menjadi anggota organisasi, hingga kegiatan nonkonvensional seperti menyampaikan petisi, mengikuti kampanye sosial, dan melakukan aksi penyampaian aspirasi. Milbrath dan Goel (1977) menjelaskan partisipasi politik memiliki tingkatan dan karakteristik yang berbeda berdasarkan intensitas keterlibatan individu dalam kehidupan politik. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, Norris (2002) mengemukakan perubahan pola partisipasi politik dari aktivitas yang berpusat pada partai politik dan pemilihan umum menuju keterlibatan yang lebih berorientasi pada isu-isu tertentu. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki berbagai alternatif untuk menyalurkan kepentingan dan pandangan politiknya sesuai dengan perkembangan lingkungan sosial.

Generasi muda dalam politik tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak, kepentingan, dan kapasitas untuk menentukan arah pembangunan masyarakat. Keterlibatan generasi muda dalam kehidupan politik perlu didukung oleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, penghormatan terhadap perbedaan, serta kemampuan menyampaikan pendapat melalui mekanisme demokratis. Dahl (1998) menempatkan partisipasi yang efektif dan pemahaman yang memadai sebagai unsur penting dalam mewujudkan proses demokrasi berkualitas. Rafiki dan Dewi (2022) menekankan pentingnya membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital.

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan ruang digital sebagai salah satu sarana baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Media sosial, situs berita, forum diskusi, petisi daring, dan kanal pengaduan publik memungkinkan warga negara memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, mengorganisasi kegiatan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Boulianne (2015) melalui kajian meta-analisis menemukan adanya hubungan positif antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik, meskipun kekuatan hubungan ini berbeda berdasarkan karakteristik dan penggunaannya. Bennett dan Segerberg (2012) memperkenalkan konsep *connective action* atau aksi konektif, yaitu bentuk gerakan kolektif yang berkembang melalui jaringan komunikasi personal dan teknologi digital tanpa harus bergantung sepenuhnya pada organisasi formal. Saud dan Margono (2021) menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi digital memberikan peluang bagi generasi muda mengekspresikan pandangan

politik dan terlibat dalam berbagai aktivitas kewarganegaraan. Ruang digital menjadi sarana strategis bagi generasi muda untuk memperluas keterlibatan politik, membangun kesadaran publik, dan menyampaikan aspirasi terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.

Meskipun ruang digital memberikan kemudahan dalam menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi politik, pemanfaatannya juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, disinformasi, polarisasi pandangan politik, serta perdebatan yang tidak konstruktif dapat menghambat terbentuknya diskusi publik yang sehat. Wardle dan Derakhshan (2017) menjelaskan gangguan informasi dalam ruang digital muncul melalui misinformasi, disinformasi, dan malinformasi berpotensi memengaruhi pemahaman serta perilaku masyarakat. Shirky (2011) yang menjelaskan pengaruh media sosial terhadap perubahan politik tidak hanya terlihat melalui mobilisasi sesaat, tetapi juga kemampuan memperkuat komunikasi dan ruang publik jangka panjang. Tufekci (2017) mengingatkan mobilisasi digital yang berlangsung cepat dapat memiliki keterbatasan apabila tidak diikuti oleh kemampuan organisasi, koordinasi, dan keberlanjutan gerakan. Kualitas partisipasi politik generasi muda perlu dilihat bukan hanya berdasarkan jumlah pengikut, komentar, atau aktivitas di media sosial, melainkan berdasarkan kemampuan memahami informasi, menghargai perbedaan pendapat, menyampaikan aspirasi secara etis, dan menghasilkan keterlibatan nyata dalam kehidupan demokrasi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan *(library research).* Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sedangkan studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian (Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019). Metode ini dipilih karena pembahasan berfokus pada penelaahan konsep, teori, hasil penelitian terdahulu mengenai peran generasi muda dalam meningkatkan partisipasi politik di era digital. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi buku tentang ilmu politik dan demokrasi, artikel jurnal ilmiah yang membahas partisipasi politik dan penggunaan media digital, laporan mengenai literasi digital, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan hak warga negara, pemilihan umum, dan pelindungan data pribadi.

Pengumpulan bahan pustaka dilakukan melalui penelusuran, pemilihan, penelaahan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber didasarkan pada kesesuaian isi dengan fokus kajian, keterkaitannya dengan tujuan penulisan, kejelasan identitas penulis atau lembaga penerbit. Snyder (2019) menjelaskan kajian literatur memerlukan proses pemilihan dan evaluasi sumber secara sistematis agar informasi yang digunakan sesuai dengan tujuan kajian. Bahan pustaka yang terkumpul kemudian dibaca dan dikelompokkan ke dalam lima tema utama, yaitu konsep partisipasi politik, peran generasi muda, peluang teknologi digital, tantangan partisipasi politik daring, dan strategi penguatan literasi politik.

Analisis data melalui pertama, mengidentifikasi dan memahami informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan partisipasi politik, peran generasi muda, serta perkembangan ruang digital. Kedua, mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan, terutama yang berkaitan dengan bentuk keterlibatan, peluang, tantangan, dan strategi peningkatan partisipasi politik. Ketiga, membandingkan gagasan dan pandangan dari berbagai sumber untuk menemukan keterkaitan maupun perbedaan pemikiran. Keempat, menyusun hasil penelaahan tersebut menjadi sintesis deskriptif yang sistematis sesuai dengan tujuan artikel. Tahapan ini sejalan dengan analisis data kualitatif yang melibatkan proses pengorganisasian, pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari informasi yang diperoleh (Miles dkk., 2014).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Generasi muda berperan meningkatkan partisipasi politik di era digital melalui keterlibatan, baik proses pemilihan umum maupun bermasyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan adalah menjadi pemilih yang cerdas dan mandiri. Sebelum menentukan pilihan dalam pemilihan umum, generasi muda perlu mempelajari visi, program, rekam jejak, dan integritas calon maupun partai politik. Hak memilih warga negara dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Informasi mengenai calon dan partai politik perlu diperiksa melalui beberapa sumber yang kredibel, bukan hanya berdasarkan unggahan viral atau dukungan tokoh yang diikuti di media sosial. Sikap kritis diperlukan untuk mengurangi kemungkinan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi palsu, tekanan kelompok, maupun sentimen sesaat. Hal ini sejalan pandangan Dahl (1998) pemahaman terhadap berbagai alternatif merupakan salah satu unsur mewujudkan partisipasi demokratis bermakna.

Selain menjadi pemilih yang cerdas, generasi muda dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan pendidikan politik. Konten berupa tulisan singkat, infografik, video penjelasan, dan diskusi daring digunakan untuk menerangkan hak pemilih, tahapan pemilihan umum, fungsi lembaga negara, serta mekanisme penyampaian pengaduan. Penyampaian informasi perlu memperhatikan keakuratan, kemudahan pemahaman, dan tidak mengandung manipulasi fakta. Boulianne (2015) menunjukkan adanya hubungan positif antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik berdasarkan hasil meta-analisis terhadap penelitian sebelumnya. Media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran kewarganegaraan dan penguatan kesadaran politik generasi muda.

Peran generasi muda berikutnya menjadi pengawas sosial terhadap kebijakan publik. Generasi muda dapat menyampaikan pertanyaan, kritik, dan saran melalui kanal resmi pemerintah, forum konsultasi publik, organisasi mahasiswa, maupun kegiatan komunitas. Keterlibatan tersebut dapat menjadi bentuk pengawasan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kritik yang disampaikan sebaiknya menjelaskan persoalan, menyertakan bukti, dan menawarkan usulan perbaikan. Pendekatan tersebut lebih konstruktif dibandingkan menyebarkan tuduhan tanpa dasar atau menyerang kehidupan pribadi seseorang. Melalui keterlibatan tersebut, generasi muda berkontribusi dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Partisipasi politik generasi muda juga perlu menghubungkan aktivitas daring dengan kegiatan secara nyata. Kampanye digital mengenai kebersihan lingkungan, akses pendidikan, transportasi, atau pelayanan publik akan lebih kuat apabila dilanjutkan melalui kerja komunitas, audiensi, pengumpulan aspirasi warga, atau pengajuan usulan kepada pihak terkait.

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang memperluas partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda. Teknologi digital dapat mengurangi hambatan jarak dan waktu dalam komunikasi politik. Informasi mengenai kebijakan dapat ditemukan dengan cepat, sementara masyarakat dapat menyampaikan tanggapan tanpa harus selalu hadir secara fisik. *Platform* digital juga memungkinkan kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau media arus utama untuk menyuarakan pengalaman dan kepentingannya. Bagi mahasiswa, ruang digital dapat dimanfaatkan untuk mengadakan diskusi, membagikan hasil kajian, serta membangun kerja sama lintas

kampus dan komunitas. Bennett dan Segerberg (2012) menjelaskan bahwa media digital dapat memfasilitasi tindakan kolektif melalui jaringan komunikasi yang memungkinkan individu menyebarkan pesan dan membangun keterlibatan bersama. Hal tersebut menunjukkan teknologi digital menjadi sarana memperluas kesempatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam persoalan publik.

Selain memperluas akses informasi, kanal digital dapat meningkatkan keterbukaan lembaga publik apabila dimanfaatkan menerbitkan informasi, menjelaskan keputusan, menerima pengaduan, dan menindaklanjuti masukan warga. Keberadaan kanal komunikasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga publik tanpa harus selalu melakukan komunikasi secara langsung. Namun, keberadaan akun resmi atau layanan pengaduan digital saja belum cukup untuk menjamin terwujudnya partisipasi yang efektif. Lembaga publik perlu memberikan respons yang jelas, menjaga aksesibilitas layanan, dan menyampaikan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Komunikasi digital dapat berlangsung secara dua arah sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi memiliki kesempatan menyampaikan pendapat dan memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Meskipun memberikan berbagai peluang, partisipasi politik di era digital juga menghadapi sejumlah tantangan dan risiko. Salah satunya penyebaran misinformasi dan disinformasi yang dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap calon, kebijakan, maupun kelompok tertentu. Wardle dan Derakhshan (2017) membedakan misinformasi sebagai informasi keliru disebarkan tanpa niat menyesatkan, sedangkan disinformasi merupakan informasi keliru yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menyesatkan. Kondisi tersebut menuntut generasi muda untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi politik. Pemeriksaan terhadap sumber, tanggal publikasi, dan bukti pendukung perlu dilakukan sebelum suatu informasi dibagikan kepada orang lain. Apabila suatu klaim belum dapat dipastikan kebenarannya, informasi tersebut sebaiknya tidak disebarluaskan sebagai fakta.

Tantangan lainnya adalah polarisasi dan komunikasi politik yang tidak sehat. Perbedaan pilihan politik merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi merusak hubungan sosial ketika disertai penghinaan, ancaman, atau pelabelan negatif terhadap kelompok lain. Sunstein (2017) menjelaskan lingkungan komunikasi

yang cenderung mempertemukan individu dengan informasi sesuai preferensinya dapat memperkuat polarisasi. Generasi muda perlu membedakan kritik terhadap gagasan dan kebijakan dari serangan terhadap identitas pribadi. Sikap terbuka terhadap bukti dan kesediaan mendengarkan pandangan berbeda membangun kedewasaan demokratis serta menjaga kualitas komunikasi politik di ruang digital.

Partisipasi digital juga berpotensi bersifat simbolis apabila hanya diwujudkan melalui aktivitas menyukai atau membagikan konten politik. Aktivitas tersebut memang dapat membantu penyebaran informasi, tetapi belum tentu menunjukkan pemahaman maupun keterlibatan politik mendalam. Aktivitas digital perlu dilengkapi pembelajaran, dialog, partisipasi dalam pemilihan umum, keterlibatan organisasi, dan pengawasan kebijakan. Selain itu, perlindungan data pribadi dan keamanan akun perlu diperhatikan agar aktivitas politik di ruang digital tidak menimbulkan risiko merugikan pengguna. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum mengenai perlindungan data pribadi pemrosesan data.

Kesenjangan akses dan kemampuan digital menjadi tantangan dalam mewujudkan partisipasi politik yang inklusif. Tidak semua warga negara memiliki koneksi internet, perangkat, maupun keterampilan digital yang sama. Verba dkk. (1995) menjelaskan bahwa sumber daya seperti waktu, uang, dan keterampilan sipil dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Perbedaan sumber daya dan kemampuan digital yang berpotensi memperlebar kesenjangan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi. Partisipasi politik ini tidak seharusnya hanya mengandalkan platform daring. Pertemuan warga, diskusi tatap muka, media cetak, dan layanan publik secara langsung tetap dibutuhkan agar kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses digital tidak tersisih dari proses demokrasi.

Berdasarkan berbagai peluang dan tantangan tersebut, penguatan partisipasi politik generasi muda perlu dilakukan melalui peningkatan literasi politik dan literasi digital. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal maupun kegiatan komunitas. Generasi muda perlu dibekali kemampuan membaca program kebijakan, mengenali sumber informasi tepercaya, memahami kewenangan lembaga negara, serta membedakan fakta, opini, dan propaganda. Kegiatan seperti diskusi kandidat berbasis isu, simulasi pemilihan umum, dan analisis kebijakan dapat membantu mengembangkan kemampuan

berpikir kritis. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran kewarganegaraan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap kehidupan bernegara. Widyatama dkk. (2022), misalnya, mengkaji pengembangan aplikasi teka-teki silang sebagai alternatif pembelajaran PPKn. Kajian ini menunjukkan salah satu dari bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran kewarganegaraan.

Penguatan partisipasi politik juga perlu didukung oleh penerapan etika komunikasi digital. Generasi muda perlu memeriksa informasi sebelum membagikan, menggunakan bahasa yang menghormati orang lain, menghindari ujaran kebencian, dan tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin. Kritik politik sebaiknya berfokus pada tindakan, program, dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap tersebut diperlukan agar ruang digital dapat digunakan sebagai sarana pertukaran gagasan yang sehat dan tidak menjadi tempat penyebaran kebencian maupun informasi menyesatkan. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup tanggung jawab dan etika dalam berkomunikasi.

Selain itu, organisasi mahasiswa dan komunitas perlu diperkuat sebagai ruang praktik demokrasi bagi generasi muda. Organisasi dapat menyelenggarakan forum aspirasi, debat terbuka, pendidikan pemilih, dan kajian terhadap isu-isu lokal. Melalui kegiatan tersebut, setiap anggota perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sementara keputusan organisasi perlu dilaksanakan secara transparan dan dapat dievaluasi. Kegiatan organisasi semacam ini memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda dalam menyampaikan aspirasi, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan bersama. Hal tersebut sejalan pandangan Dahl (1998) mengenai pentingnya kesempatan partisipasi yang efektif bagi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Organisasi mahasiswa dan komunitas menjadi sarana pembelajaran demokrasi sekaligus wadah untuk mengembangkan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Upaya penguatan partisipasi politik generasi muda juga membutuhkan dukungan institusi publik melalui penyediaan saluran partisipasi responsif dan inklusif. Pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat perlu memastikan bahwa aspirasi warga disampaikan dan ditanggapi secara jelas. Kolaborasi antarpihak diperlukan agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna media digital, tetapi juga

dapat berperan sebagai mitra dalam memperbaiki kualitas kebijakan dan kehidupan demokrasi. Saluran partisipasi yang mudah diakses dan memiliki mekanisme tindak lanjut akan memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

V. KESIMPULAN

Generasi muda berperan meningkatkan partisipasi politik di era digital, baik melalui keterlibatan dalam pemilihan umum maupun aktivitas sosial dan pengawasan kebijakan publik. Peran ini diwujudkan melalui sikap menjadi pemilih yang cerdas dan mandiri, pemanfaatan media digital untuk menyebarkan pendidikan politik, penyampaian aspirasi secara kritis, serta penghubungan aktivitas daring dengan tindakan nyata di masyarakat. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi generasi muda memperoleh informasi, membangun komunikasi, memperluas jaringan, dan terlibat dalam proses demokrasi secara lebih terbuka. Namun, peluang tersebut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penyebaran misinformasi dan disinformasi, polarisasi, partisipasi bersifat simbolis, kesenjangan akses dan kemampuan digital. Peningkatan kualitas partisipasi politik generasi muda perlu didukung oleh penguatan literasi politik dan digital, penerapan etika komunikasi, pengembangan organisasi dan komunitas sebagai ruang praktik demokrasi, serta penyediaan saluran partisipasi publik responsif dan inklusif.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society, 15*(5), 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society, 18*(5), 524–538. https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.

Gumuruh, A. R., Wicaksono, H., & Maulana, A. (2022). Peran masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2*(2), 70–82. https://doi.org/10.36456/p.v2i2.6909

Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.

Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political participation: How and why do people get involved in politics?* (2nd ed.). Rand McNally.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Norris, P. (Ed.). (2002). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press.

Rafiki, R., & Dewi, D. A. (2022). Gerakan muda berkarakter Pancasila di era digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2*(2), 83–90. https://doi.org/10.36456/p.v2i2.6910

Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics, 18*(4), 443–454. https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019

Shirky, C. (2011). The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change. *Foreign Affairs, 90*(1), 28–41.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media* (2nd ed.). Princeton University Press.

Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.

Widyatama, P. R., Novitasari, A., Selek, A. S. D., Almaulana, A. W., Agustin, R. N. A., Sholihak, S. M. A., Nisa'Q, M. F., Andriyani, N. B., Ngene, P. K., & Suyono. (2022). Pengembangan aplikasi teka-teki silang (TTS) sebagai alternatif pembelajaran PPKn kelas IX pada materi lembaga-lembaga negara. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2*(1), 1–9. https://doi.org/10.36456/p.v2i1.5457